

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada tahun 2026, Kabupaten Muara Enim menjadi acuan dalam perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 4 daerah yang menjadi acuan dalam perhitungan inflasi, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKI.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Muara Enim Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pada April 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Muara Enim sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,08
 - Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,94 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,93 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,03 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,42 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran sebesar 0,31 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 18,08 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks atau terjadi deflasi y-on-y yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,64 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,80 persen dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,98
 - Pada April 2026 terjadi deflasi *month to month (m-to-m)* di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,18 persen.
 - Pada April 2026 terjadi inflasi *year to date (y-to-d)* di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,77 persen. Indeks Harga Konsumen / Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2026 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Muara Enim. Pada April 2026 terjadinya inflasi y-on-y sebesar 1,48 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,43 pada April 2025 menjadi 113,08 pada April 2026. Sementara itu, terjadi deflasi *m-to-m* sebesar 0,18 persen dan inflasi *y-to-d* sebesar 0,77 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Rumah Tangga sebesar 1,94 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,93 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,003 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,42 persen; Kelompok penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,58 persen. Sedangkan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; kelompok Transportasi; dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mengalami deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,64 persen' 0,01 persen dan 1,98 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2026, antara lain: emas perhiasan, daging ayam ras, beras, minyak goreng, bahan bakar

rumah tangga, ikan nila, ikan patin, telur ayam ras, kangkung, bayam, dan sewa rumah. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain; caca merah, tomat, bawang putih, bawang merah, kopi bubuk, cabai rawit, tarif kendaraan travel, telepon seluler, bensin, kentang, tempe, dan mainan anak.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada JApril 2026, antara lain: minyak goreng, bawang merah, ikan patin, beras, jeruk, kangkung, ikan nila, penyedap makan/vetsin, batu bata/batu tela, baju kaos tanpa kera/t-shirt anak, gula pasir, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, cabai merah, tarif kendaraan travel, cabai rawit, tomat, bawang putih, telepon seluler. Dan angkatan antar kota.

Pada April 2026, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,58 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* masing-masing sebesar 0,27 persen; 0,08 persen; 0,04 persen. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi *y-on-y* di Kabupaten Muara Enim.

2. Pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year (*y-on-y*) Kabupaten Muara Enim sebesar 3,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,95. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen; kelompok transportasi sebesar 1,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,14 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,37 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,44 persen dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,17 persen.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,12 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen; kelompok transportasi sebesar 1,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,14 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,37 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi *y-on-y* masing-masing sebesar 0,44 persen dan 2,17 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Mei 2026,

antara lain: emas perhiasan, beras, cabai merah, daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, ikan nila, kue kering berminyak, pemeliharaan/service, bahan bakar rumah tangga, ikan patin, pelumas/oli mesin, kangkung, telur ayam ras, jeruk dan semangka. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tomat, bawang putih, kopi bubuk, mainan anak, telepon seluler, tempe, bensin, kentng, dan buku tulis bergaris.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2026, antara lain: cabai merah, tomat, bawang merah, pemeliharaan/service, kue kering berminyak, pelumas/oli mesin, cabai rawit, dan beras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-yo-m, antara lain: emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan patin, bayam, bawang putih, sepeda, gaing sapi, kangkung, dan mainan anak.

Pada Mei 2026, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik dn bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,19 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,34 persen. Kelompok informasi, komonikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya meberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y sebesar 0,03 persen dan 0,04 persen.

3. Pada Juni 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Muara Enim sebesar 3,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,51.

- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 03,81 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebear 2,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 peren; kelompok perlengkapan, perlatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,15 persen; kelompok transportasi sebesar 4,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran senesar 1,90 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,59 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok informasi, kamunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,65 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Muara Enim bulan Juni 2026 masing-masing sebesar 0,49 persen dan 2,04 persen.

▪ Indeks Harga Konsumen / Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum y-on-y menunjukkan adanya Kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Muara Enim, pada Juni 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,81 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,30 pada Juni 2025 menjadi 117,54 pada Juni

2026. Sedangkan tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,49 persen dan 2,04 persen.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,81 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,15 persen; kelompok transportasi sebesar 4,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,90 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,59 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi *y-on-y* masing-masing sebesar 0,17 persen dan 1,65 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/kontribusi inflasi *y-on-y* pada Juni 2026, antara lain: emas perhiasan, cabai merah, bendin, bawang merah, minyak goreng, beras, cabai rawit, kue kering berminyak, ikan nila, pemeliharaan/service, pelumas/oli mesin, jeruk, kangkung. Ikan patin dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: telur ayam ras, kopi bubuk, mainan anak, tempe, telepon seluler, buku tulis bergaris, kentang, sepeda, detergen cair, dan gula pasir.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2026, antara lain: tomat, bensin, bang putih, pelumas/oli mesin, kol putih/kubis, beras, sawi putih/pecay/pitsai, es, bayam, dan kue kering berminyak. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, dan gula pasir.

Pada juni 2026, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,56 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,50 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,28 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* sebesar 0,01 persen dan 0,03 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengendalian Inflasi berdasarkan Strategi 4K antara lain :

K-1 Ketersediaan Pasokan :

- Produksi Lokal belum stabil, terutama komoditas hortikultura
- Perubahan cuaca yang mengganggu hasil produksi pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Muara Enim

Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah daerah

K-2 Keterjangkauan Harga :

- Gejolak harga pada menjelang dan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha
- Daya beli masyarakat rentan tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok

K-3 Kelancaran Distribusi :

- Hasil produksi pertanian dan hortikultura tidak sepenuhnya masuk ke pasar yang berada di Wilayah Kabupaten Muara Enim tetapi di bawa ke Luar Daerah
- Rantai distribusi panjang (banyak perantara)
- Belum terselenggaranya subsidi ongkos angkutan kendaraan bahan pangan di Kabupaten Muara Enim

K-4 Komunikasi Efektif :

- Belum terselenggaranya secara optimal Kerjasama Antar Daerah dengan daerah penghasil bahan pangan di Kabupaten Muara Enim

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga di daerah juga berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Manfaat positif yang dapat diperoleh dengan terciptanya stabilitas harga di daerah diantaranya, yaitu :

1. Terjaganya daya beli sehingga dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha khususnya investasi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

Koordinasi pengendalian inflasi merupakan elemen penting untuk keberhasilan pengendalian inflasi, karena determinan inflasi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan baik kebijakan moneter, fiskal maupun sektoral yang melibatkan berbagai macam instansi baik di level pusat maupun daerah, serta keterikatan ekonomi antar daerah, sehingga tekanan inflasi yang terjadi di suatu daerah berpotensi merambat ke daerah lainnya.

Berikut beberapa pelaksanaan kegiatan selama bulan April s.d Juni Tahun 2026 dalam Rangka Pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim :

1. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Inflasi Untuk mendukung tugas TPID, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 242.379.171.699,94.
2. Dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim, telah ditetapkan Tim Pengendalian dan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 28/KPTS/V/2024 tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim

◦

Pengendalian dan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim

3. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah melalui penetapan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 910/KPTS/V/2022 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2027
4. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 1.14/029/IJ tentang Pengawasan APIP atas Pengendalian Inflasi Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Muara Enim membentuk Tim Pengawas Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Muara Enim Nomor 36/KPTS/INSPEKTORAT-IRS/2025.

Tim Pengawas Pengendalian Inflasi Daerah setiap harinya berkordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait data sebagai berikut:

- a. Perkembangan harian harga komoditas terpilih.
- b. Penyebab terjadinya kenaikan harga komoditas terpilih.
- c. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengendalian inflasi
- d. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam
- e. pengendalian inflasi.
- f. Stok beras dan potensi kekurangan stok beras sebagai dampak El Nino

Data tersebut dilaporkan setiap harinya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui <http://wasinflasi.kemendagri.go.id> dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara online melalui aplikasi *zoom meeting* dan Rapat Koordinasi Internal TPID
6. Melaksanakan Rapat bersama Badan Pusat Statistik dengan Tim Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten Muara Enim
7. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) Bulan Januari dan Maret Tahun 2026
8. Gerakan Menanam
9. Panen Raya
10. Monitoring Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Barang Kebutuhan Pokok
11. Kerjasama dengan Daerah Penghasil Komoditi untuk Kelancaran Pasokan antara lain :
 - a. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Nomor : 134.4/08/IV/2023

Nomor : 415.4/97/MoU/I/2023

Tanggal : 27 November 2023

- b. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Nomor : 134.4 /08/ IV/2023

Nomor : 415.4/97/MoU/I/2023

Tanggal : 23 Mei 2023

c. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim

Nomor :119/012/IV/2024

Nomor : 303/16030/HM.310/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

d. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kota Pagaralam

Nomor :134.4./005/IV/2024

Nomor : 09/KPA/2024

Tanggal : 11 September 2024

e. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim dan Dinas Pertanian Kota Pagaralam

Nomor : 134.4/005/PKS/TPHP/IV/2024

Nomor : 520/2027/DISTAN/2024

Tanggal : 18 September 2024

f. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagaralam

Nomor : 526/427/DKP2/2024

Nomor : 521/631/DKP/2024

Tanggal : 3 Oktober 2024

g. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Badan Urusan Logistik Cabang Lahat

Nomor :119/24/IV/2024

Nomor : PK-001/06010/10/2024

Tanggal 28 Oktober 2024

h. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tentang Kerja Sama Antara Daerah;

Nomor :134.4/39/IV/2025

Nomor : 100/37/KB/KERJA SAMA-2025

Tanggal 22 Oktober 2025

i. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;

Nomor :134.4/40/IV/2025

Nomor : 100.3.7.1/14/KB.BTD-2025

Tanggal 22 Oktober 2025

j. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tentang Penguatan Bidang Perdagangan;

Nomor :134.4/15/PKS/DISPERINDAG ESDM-02/IV/2025

Nomor : 100/37/PKS/KERJA SAMA-2025

Tanggal 22 Oktober 2025

k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta ESDM Kabupaten Muara Enim, dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar tentang Stabilisasi Harga dan Pendistribusian Kebutuhan Bahan Pangan;

Nomor :134.4/15/PKS/DISPERINDAG ESDM-02/IV/2025

Nomor : 100.3.7.1/34/PKS/TD-2025

Tanggal 22 Oktober 2025

l. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar tentang Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Melalui Fasilitasi, Pendampingan, Budidaya, dan Pemasaran Komoditi Pertanian.

Nomor :134.4/16/PKS/DTPHP/IV/2025

Nomor : 100.3.7.1/33/PKS/TD-2025

Tanggal 22 Oktober 2025

m. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Potensi Daerah.

Nomor :134.4/09/IV/2026

Nomor : 100.3.7/35/01.01/2026

Tanggal 22 Juni 2025

n. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Demak Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Nomor :134.4/08/IV/2026

Nomor : 100.3.7/19/KB/IV/2026

Tanggal 22 Juni 2025

o. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

Nomor :134.4/13/PKS/DKP/IV/2026

Nomor : 100.3.7/36/20/2026

Tanggal 22 Juni 2025

p. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

Nomor :134.4/12/PKS/DKP/IV/2026

Nomor : 100.3.7/24/PKS/VI/2026

Tanggal 23 Juni 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim pada triwulan II 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim dan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Muara Enim.
2. Perlunya Pelaksanaan program kegiatan yang terarah dalam upaya pengendalian inflasi secara jangka pendek, Menengah dan Panjang di Kabupaten Muara Enim.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi program kerja bersama sampai dengan akhir tahun di Kabupaten Muara Enim

pada triwulan II 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perkuat Ketahanan Produksi Pangan

Pemerintah perlu memperluas pendampingan kepada petani melalui penyediaan bantuan irigasi, pompa air, benih tahan kekeringan, serta pengaturan pola tanam yang adaptif terhadap El Nino. Upaya ini bertujuan menjaga produksi komoditas strategis agar pasokan tetap tersedia dan tekanan inflasi pangan dapat diminimalkan.

2. Efisiensikan Distribusi Komoditas

Kenaikan harga BBM perlu diimbangi dengan peningkatan efisiensi distribusi melalui penguatan kerjasama dengan distributor, optimalisasi jalur logistik, dan fasilitasi distribusi dari sentra produksi ke pasar. Langkah ini dapat menekan kenaikan biaya angkut sehingga harga komoditas tetap terkendali.

3. Perkuat Stabilisasi Harga Pangan

Pemerintah bersama TPID perlu mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan kerja sama antar daerah terutama untuk komoditas yang berpotensi terdampak El Nino. Program tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan dan mengurangi gejolak harga ditingkat konsumen.

4. Tingkatkan Pemantauan dan Antisipasi Inflasi

Pemantauan harga, stok, dan distribusi komoditas strategis perlu dilakukan secara lebih intensif selama periode El Nino dan pasca-penyesuaian BBM. Informasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan langkah antisipatif yang cepat sehingga lonjakan inflasi dapat dicegah sebelum berdampak lebih luas terhadap daya beli masyarakat.